1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    a. Perkembangan inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
    Tingkat inflasi month to month (m to m) dan tingkat inflasi year to date (y to d) Banyuwangi bulan Januari 2026 mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,21 persen, sedangkan Jawa Timur dan Nasional juga mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,54 persen dan -0,76 persen. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan sehingga terjadi deflasi di Banyuwangi adalah karena adanya penurunan harga pada komoditas cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, udang basah, tomat, anggur, wortel, kelapa, bensin, pisang, cumi-cumi, angkutan udara, jagung manis, nanas, kangkung, telur puyuh, daun paku/pakis, dan apel. Pada Januari 2026, Banyuwangi mengalami inflasi year on year (y on y) sebesar 3,24 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,76. Inflasi y on y Banyuwangi tercatat lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 1,72 persen. Sedangkan untuk komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (y on y) bulan Januari 2026 masih dipimpin oleh komoditas emas perhiasan, disusul tarif listrik, beras, jeruk, bahan bakar rumah tangga, tongkol diawetkan, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, Sigaret Kretek Mesin (SKM), ikan lamuru, telur ayam ras, udang basah, minyak goreng, cumi-cumi, sepeda motor, ikan kembung, pepes, panci, ketimun, kulkas/lemari es, dan kerupuk (mentah).
    b. Pada Februari 2026, secara m to m, Banyuwangi mengalami inflasi sebesar 0,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,80. Tingkat inflasi tersebut diikuti inflasi year to date (y to d) sebesar 0,73 persen. Beberapa komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi di Banyuwangi adalah karena adanya kenaikan harga pada komoditas Emas Perhiasan, Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Beras, Jeruk, Jagung Manis, Cabai Merah, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu, Telur Ayam Ras, Sigaret Kretek Tangan (SKT), Labu Siam/Jipang, Ikan Kembung, Daging Sapi, Tongkol Diawetkan, dan Kue Basah. Inflasi y on y Banyuwangi pada Februari 2026 sebesar 4,47 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year on year (y on y) bulan Februari 2026 masih dipimpin oleh komoditas Emas Perhiasan, disusul Tarif Listrik, Beras, Jeruk, Daging Ayam Ras, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu, Bawang Merah, Ikan Lamuru, Telur Ayam Ras, Tongkol Diawetkan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Ikan Kembung, Daging Sapi, Sepeda Motor, Minyak Goreng, Pepes, Panci, Kerupuk (Mentah), Ketimun, dan Ikan Asin Peda.
    c. Pada Maret 2026, secara month to month (m to m), Banyuwangi mengalami inflasi sebesar 0,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,21. Tingkat inflasi tersebut diikuti inflasi year to date (y to d) sebesar 1,10 persen. Beberapa komoditas yang patut diberikan atensi karena dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m to m di Banyuwangi adalah karena adanya kenaikan harga pada komoditas Daging Ayam Ras, Cabai Rawit, Telur Ayam Ras, Daging Sapi, Bahan Bakar Rumah Tangga, Tomat, Cabai Merah, Bawang Merah, Nasi dengan Lauk, Beras, Ikan Kembung, dan Udang Basah. Pada Maret 2026, inflasi y on y Banyuwangi sebesar 3,30 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year on year (y on y) bulan Maret 2026 masih dipimpin oleh komoditas Emas Perhiasan, lalu disusul oleh Tarif Listrik, Daging Ayam Ras, Beras, Jeruk, Telur Ayam Ras, Ikan Lamuru, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Daging Sapi, Ikan Tongkol/Ikan Ambu-ambu, Ikan Kembung, Bahan Bakar Rumah Tangga, Nasi dengan Lauk, Tongkol Diawetkan, Ikan Asin Peda, Pepes, Minyak

Goreng, Angkutan Udara, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun
2026 adalah sebagai berikut:

a. Triwulan I Tahun 2026 diawali dengan deflasi pada bulan Januari sebesar -0,21 persen yang dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras. Namun, kondisi tersebut berbalik pada bulan Februari dengan terjadi inflasi bulanan sebesar 0,94 persen, kemudian masih berlanjut pada bulan Maret sebesar 0,37 persen. Peningkatan inflasi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang dan selama bulan suci Ramadhan serta Idulfitri, disertai kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis.
b. Deflasi pada bulan Januari terutama disumbang oleh penurunan harga komoditas cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, udang basah, dan tomat. Sementara itu, inflasi pada bulan Februari dan Maret didorong oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras, cabai rawit, beras, telur ayam ras, jeruk, daging sapi, bahan bakar rumah tangga, serta bawang merah, yang merupakan komoditas dengan kontribusi besar terhadap inflasi pangan daerah.
c. Inflasi year on year (y on y) Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang cukup tinggi sepanjang Triwulan I Tahun 2026, yaitu 3,24 persen pada Januari, meningkat menjadi 4,47 persen pada Februari, kemudian menurun menjadi 3,30 persen pada Maret. Meskipun masih berada dalam kisaran yang relatif terkendali, inflasi tersebut berada di atas capaian Jawa Timur maupun nasional sehingga memerlukan pengendalian yang lebih intensif, terutama terhadap komoditas pangan bergejolak (volatile food).
d. Dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi masih didominasi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan yang secara konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar selama Triwulan I Tahun 2026. Tingginya permintaan masyarakat terhadap emas perhiasan menjelang Hari Raya serta ketidakpastian ekonomi global turut memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi tahunan, sekaligus mencerminkan masih terjaganya kemampuan konsumsi masyarakat.
e. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga menjadi penyumbang utama inflasi selama Triwulan I Tahun 2026. Kenaikan harga pada komoditas beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, jeruk, bawang merah, serta berbagai komoditas perikanan menjadi faktor dominan yang mendorong inflasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan Ramadhan, meskipun pasokan sebagian besar komoditas masih relatif terjaga.
f. Dari sisi komoditas, inflasi Triwulan I Tahun 2026 masih didominasi oleh komoditas pangan strategis dan komoditas nonpangan. Selain emas perhiasan, komoditas yang secara konsisten memberikan andil inflasi adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, jeruk, bawang merah, ikan tongkol, ikan lamuru, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi tetap perlu difokuskan pada upaya menjaga kelancaran pasokan, stabilitas distribusi, serta penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya dalam menghadapi peningkatan permintaan pada hari besar keagamaan dan menjaga stabilitas harga komoditas pangan

strategis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. **Keterjangkauan Harga**
    a. Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga dan mendukung pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong percepatan penyelesaian revitalisasi Pasar Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Meskipun penyelesaian proyek belum dapat memenuhi target akhir tahun 2025 akibat kendala teknis pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian administrasi di tingkat pemerintah pusat, serta keterlambatan pengadaan material utama berupa rangka baja sistem knockdown, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara intensif melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pelaksana proyek, dan perangkat daerah terkait agar pembangunan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Langkah tersebut dilakukan mengingat Pasar Banyuwangi merupakan salah satu pusat perdagangan utama yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran distribusi dan transaksi berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Selain mempercepat penyelesaian pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga melakukan berbagai persiapan operasional, antara lain pendataan ulang pedagang yang akan menempati kios dan los baru agar proses relokasi dari lokasi sementara dapat berlangsung secara tertib. Revitalisasi pasar tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan fasilitas perdagangan yang lebih aman, nyaman, dan representatif, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi aktivitas perdagangan melalui penataan area pasar basah, pasar kering, area kuliner, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan sistem perdagangan yang lebih tertata, diharapkan distribusi barang menjadi lebih lancar, biaya transaksi dapat ditekan, dan aktivitas jual beli berlangsung lebih efektif sehingga turut mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen. Upaya percepatan revitalisasi tersebut juga didukung oleh kondisi harga bahan pokok yang mulai menunjukkan tren stabil pada Januari 2026 setelah periode Natal dan Tahun Baru. Normalisasi harga beberapa komoditas strategis, seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, menjadi momentum yang perlu dijaga melalui optimalisasi fungsi pasar sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menargetkan Pasar Banyuwangi dapat mulai beroperasi sebelum Ramadan sehingga mampu mengakomodasi meningkatnya aktivitas perdagangan, menjaga kelancaran distribusi barang, memperkuat persaingan usaha yang sehat, serta mendukung keterjangkauan harga bagi masyarakat pada periode meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
    b. Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga dan mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali melaksanakan operasi pasar murah sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ini diselenggarakan secara bertahap di berbagai kecamatan dengan melibatkan perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), distributor, serta pelaku usaha pangan guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sinergi tersebut juga bertujuan memperpendek

rantai distribusi sehingga harga jual komoditas dapat berada di bawah harga pasar. Melalui operasi pasar murah,disediakan berbagai komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam, tepung terigu, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga yang telah disubsidi atau lebih rendah dibandingkan harga pasar. Lokasi pelaksanaan diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mengalami kenaikan harga pangan berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan stok di pasar tradisional. Selain itu, juga diterapkan pembatasan pembelian terhadap beberapa komoditas, seperti beras maksimal dua paket (10 kilogram) per orang, agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Pelaksanaan operasi pasar murah mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu memberikan selisih harga sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 lebih murah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui keberlanjutan program operasi pasar murah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan komitmennya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pangan serta mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok. Upaya ini diharapkan mampu mengendalikan gejolak harga menjelang Ramadan dan Idulfitri, memperkuat pengendalian inflasi daerah, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang wajar.

c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai upaya memperkuat sistem distribusi barang kebutuhan pokok di tingkat desa dan kelurahan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan kantor koperasi, salah satunya di Kelurahan Karangrejo, serta memberikan kesempatan kepada desa dan kelurahan lain untuk memanfaatkan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu memperluas keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan dalam mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok secara lebih efisien. Keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, memperkuat jaringan pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi wadah penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses permodalan, pengembangan usaha produktif, dan peningkatan daya saing pelaku usaha lokal. Dengan semakin kuatnya peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan, stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok dapat lebih terjaga sehingga turut mendukung upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga membangun sinergi dengan Kodim 0825 Banyuwangi, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan kantor Koperasi Merah Putih. Kolaborasi tersebut tidak hanya mendukung penyediaan sarana kelembagaan koperasi, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan berkembangnya Koperasi Merah Putih, pemerintah daerah berharap tercipta sistem perdagangan yang lebih efisien, distribusi barang yang lebih pendek, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok yang semakin baik bagi masyarakat sekaligus mendukung stabilitas inflasi daerah.
d. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menjaga keterjangkauan harga

bahan kebutuhan pokok sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Hasil pemantauan di Pasar Srono menunjukkan bahwa setelah momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), harga sejumlah komoditas pangan mulai mengalami penurunan dan berangsur stabil. Kondisi ini mencerminkan efektivitas langkah-langkah pengendalian harga yang dilakukan melalui pemantauan perkembangan harga, koordinasi dengan pelaku usaha, serta pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan pangan di pasar tradisional. Salah satu komoditas yang mengalami perubahan signifikan adalah cabai rawit. Berbeda dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya yang umumnya mengalami lonjakan harga pada awal tahun, harga cabai rawit pada Januari 2026 justru bertahan stabil di kisaran Rp30.000 per kilogram dan bahkan turun menjadi sekitar Rp28.000 per kilogram. Sebelumnya, menjelang perayaan Nataru harga cabai rawit sempat mencapai sekitar Rp80.000 per kilogram, namun setelah periode libur berakhir harga kembali menurun. Stabilitas harga tersebut didukung oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian distribusi pasokan dari Pulau Jawa ke wilayah lain serta upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tengah tantangan cuaca yang berdampak pada hasil panen petani. Selain cabai rawit, penurunan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas pangan lainnya. Harga tomat turun dari sekitar Rp10.000 menjadi Rp7.000 per kilogram, cabai besar dari Rp20.000 menjadi Rp14.000 per kilogram, bawang merah dari Rp45.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, brokoli dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, serta daging ayam ras dari kisaran di atas Rp30.000 menjadi sekitar Rp28.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih mengalami sedikit kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, namun secara umum kondisi harga bahan pangan di pasar masih relatif terkendali. Stabilitas harga berbagai komoditas tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pencapaian sasaran pengendalian inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, distributor, pelaku usaha dan kerjasaama antar daerah untuk melakukan pemantauan harga secara berkala, menjaga kelancaran distribusi, serta mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang periode meningkatnya permintaan, seperti bulan Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya. Melalui berbagai langkah tersebut, keterjangkauan harga pangan diharapkan tetap terjaga sehingga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat terus dipertahankan.

e. Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga bahan pangan, khususnya telur ayam ras, menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan kondisi pasokan di pasar tradisional. Pemantauan dilakukan untuk memastikan harga telur ayam ras tetap berada pada tingkat yang wajar dan tidak mengalami kenaikan yang berlebihan, mengingat telur merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang banyak dikonsumsi masyarakat serta menjadi sumber protein penting bagi kebutuhan rumah tangga. Upaya pemantauan harga dilakukan secara berkala dengan memperhatikan perkembangan harga di tingkat pedagang maupun kondisi pasokan di pasar. Pada awal Februari 2026, harga telur ayam ras di Kabupaten Banyuwangi berada pada kisaran Rp28.000–Rp30.000 per kilogram dan relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut perlu terus dijaga karena meskipun tidak mengalami lonjakan yang signifikan, perubahan harga sebesar Rp2.000–Rp3.000 per kilogram dapat memberikan tambahan beban bagi pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang

memiliki keterbatasan daya beli. Selain pemantauan harga, Pemkab Banyuwangi juga terus memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pengawasan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan pasokan menjadi bagian dari langkah deteksi dini untuk mengetahui apabila terjadi tekanan pada komoditas telur ayam ras maupun bahan pangan lainnya. Dengan informasi harga yang diperoleh secara rutin, pemerintah dapat menentukan langkah intervensi yang diperlukan apabila terjadi kenaikan harga yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat. Stabilitas harga telur ayam ras juga perlu didukung dengan terjaminnya kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan dari sentra produksi menuju pasar. Oleh karena itu, pengendalian harga dilakukan secara terpadu melalui pemantauan kondisi pasar dan koordinasi dengan pelaku usaha serta pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar akibat gangguan pasokan maupun distribusi, sekaligus menjaga agar harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.

f. Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat sektor usaha mikro dan warung rakyat melalui Program Warung Naik Kelas (Wenak). Program yang telah dilaksanakan sejak 2021 tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dari keluarga kurang mampu. Hingga tahun 2025, program Wenak telah menjangkau 1.559 warung rakyat, dan pada tahun 2026 kembali dilanjutkan dengan memberikan dukungan berupa bantuan modal usaha, peralatan, serta fasilitasi legalitas usaha. Penguatan warung rakyat menjadi penting dalam mendukung keterjangkauan harga karena warung merupakan salah satu titik utama masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari, terutama di wilayah perdesaan. Melalui bantuan modal usaha sebesar Rp1 juta dan dukungan peralatan usaha, pemerintah membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan keberlangsungan usahanya. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana usaha, membeli peralatan baru, maupun menambah stok barang dagangan, sehingga warung tetap mampu melayani kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Program Wenak juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi dapat berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah memberikan fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada penerima bantuan sehingga usaha memiliki legalitas dan dapat memperoleh akses terhadap pembinaan maupun peluang permodalan lanjutan. Dengan semakin kuatnya kapasitas usaha mikro, diharapkan keberlangsungan pasokan barang di tingkat masyarakat dapat terjaga dan konsumen tetap memiliki akses terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari tanpa harus memperoleh barang dari lokasi yang jauh. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, calon penerima program diusulkan oleh pemerintah desa dan kelurahan, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Penerima bantuan juga diupayakan berbeda setiap tahun agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Selain menggunakan dukungan APBD, pelaksanaan program Wenak turut diperkuat melalui kontribusi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
g. Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong penguatan

aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ramadan menjadi momentum penting bagi peningkatan aktivitas perdagangan, khususnya pada sektor kuliner dan makanan berbuka puasa. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi berupaya memastikan pelaku UMKM dapat memanfaatkan peningkatan permintaan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pilihan produk pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui fasilitasi pasar takjil Ramadan di berbagai kecamatan dan pusat keramaian. Ratusan pelaku UMKM dilibatkan dalam berbagai kegiatan, termasuk Festival Ngerandu Buko di Pantai Marina Boom serta pasar Ramadan yang diselenggarakan di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan pasar takjil tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan berbagai produk makanan dan minuman secara langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, semakin banyaknya pelaku usaha yang terlibat turut memperluas pilihan produk bagi konsumen dan mendukung terbentuknya harga yang kompetitif selama Ramadan. Pemkab Banyuwangi juga melakukan penataan lokasi pasar takjil agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib, aman, dan nyaman. Penataan tersebut mendukung kelancaran interaksi antara pedagang dan konsumen serta memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan makanan dan minuman berbuka di lokasi yang mudah dijangkau. Dengan tersedianya sentra-sentra perdagangan sementara di berbagai wilayah, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk memperoleh produk pangan selama Ramadan, sehingga akses terhadap kebutuhan konsumsi dapat semakin mudah. Selain menyediakan ruang pemasaran, pemerintah daerah juga memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan usaha dan fasilitasi legalitas, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin edar produk. Dukungan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, serta daya saing produk UMKM sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas pelaku usaha diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produksi dan mendorong semakin banyak UMKM mampu menyediakan produk pangan bagi masyarakat dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Pemkab Banyuwangi juga terus memperluas akses pelatihan, pemasaran digital, dan pembinaan usaha agar UMKM tidak hanya berkembang pada momentum Ramadan, tetapi mampu bertahan dan naik kelas dalam jangka panjang. Dengan semakin kuatnya pelaku UMKM lokal, aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus bergerak sekaligus menciptakan sumber pendapatan bagi keluarga dan masyarakat di tingkat desa.

2. **Ketersediaan Pasokan**
    a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan melalui berbagai program peningkatan produksi pertanian sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan. Berbagai langkah dilakukan secara terintegrasi, mulai dari peningkatan produktivitas lahan, penyediaan sarana produksi pertanian, perlindungan lahan pertanian, hingga modernisasi sektor pertanian. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan meningkatnya produksi padi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 menjadi 806.407 ton, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 794.842 ton. Capaian tersebut semakin memperkuat peran Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Dalam menjaga keberlanjutan produksi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian

dengan mendorong peningkatan luas tanam yang pada tahun 2025 mencapai 121.319 hektare, sementara luas baku sawah tetap dipertahankan sebesar 62.940 hektare. Pemerintah daerah juga terus berupaya melindungi lahan sawah produktif dari alih fungsi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan potensial untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Selain itu, peningkatan Indeks Pertanaman (IP) terus didorong agar frekuensi tanam dapat meningkat sehingga produktivitas lahan semakin optimal. Untuk menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Pada tahun 2025, pemerintah berhasil menyediakan alokasi 44.550 ton pupuk urea atau sekitar 97,38 persen dari usulan kebutuhan, serta 40.493 ton pupuk NPK atau sekitar 99,61 persen dari kebutuhan yang diusulkan. Ketersediaan pupuk tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas tanaman padi sehingga produksi dapat terus meningkat dan pasokan beras tetap terjaga. Selain penyediaan sarana produksi, pemerintah daerah juga terus memperkuat modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), pemberdayaan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Pendampingan kepada petani dilakukan secara berkelanjutan oleh penyuluh pertanian melalui transfer teknologi, penerapan inovasi budidaya, dan pelaksanaan program Jagoan Tani, sehingga efisiensi usaha tani dan produktivitas pertanian terus meningkat. Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menjaga ketersediaan pasokan pangan di daerah sekaligus memperkuat stabilitas pasokan beras di tingkat regional maupun nasional. Peningkatan produksi yang didukung oleh optimalisasi lahan, penyediaan pupuk bersubsidi, modernisasi pertanian, dan pendampingan kepada petani menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung pengendalian inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan pasokan pangan hewani melalui peningkatan populasi ternak sapi secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan program inseminasi buatan (IB) melalui pengelolaan Bank Sperma Ternak yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas ternak, menjaga keberlanjutan populasi sapi, serta memastikan ketersediaan pasokan daging bagi masyarakat sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara rutin memastikan ketersediaan sperma beku berkualitas yang dipasok dari Balai Inseminasi Buatan (BIB) Singosari dan BIB Lembang. Ribuan dosis sperma disimpan menggunakan teknologi penyimpanan dengan nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celsius sehingga kualitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, sperma beku tersebut didistribusikan secara berkala kepada petugas inseminator yang bertugas di seluruh kecamatan agar pelayanan kepada peternak dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah juga menyediakan berbagai jenis bibit unggul, seperti Simental, Limousin, Brahman, Belgian Blue, Peranakan Ongole (PO), Friesian Holstein (FH), Angus, sapi Bali, serta bibit kerbau dan domba untuk memenuhi kebutuhan peternak. Pelaksanaan program didukung oleh 52 inseminator aktif yang memberikan layanan langsung kepada peternak. Melalui program tersebut, Banyuwangi mampu menghasilkan sekitar 2.300 kelahiran ternak setiap bulan, sehingga populasi sapi terus meningkat dan ketersediaan pasokan daging dapat terjaga. Melalui penguatan Bank Sperma

Ternak, penyediaan bibit unggul, distribusi sperma beku yang berkelanjutan, serta pendampingan kepada peternak, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan pangan hewani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor peternakan. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas pasokan daging, mendukung pengendalian inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan peternak di Kabupaten Banyuwangi.

c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan, khususnya komoditas perikanan, melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat yang mencapai sekitar 124 ribu ton per tahun, sementara produksi perikanan daerah saat ini masih berkisar 88 ribu ton, yang terdiri atas sekitar 60 ribu ton hasil perikanan tangkap dan 28 ribu ton hasil perikanan budidaya. Upaya peningkatan produksi menjadi prioritas agar ketergantungan terhadap pasokan ikan dari luar daerah dapat dikurangi sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani. Sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perikanan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan di wilayah perairan selatan hingga Samudra Hindia yang diperkirakan memiliki potensi tangkapan mencapai sekitar 212 ribu ton. Optimalisasi potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan daerah sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat dapat dipenuhi secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kapasitas sektor perikanan melalui penguatan kerja sama dengan para nelayan, pengembangan armada penangkapan ikan, serta peningkatan kemampuan nelayan dalam memanfaatkan wilayah penangkapan yang memiliki potensi lebih besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan penangkapan ikan, meningkatkan hasil tangkapan nelayan, serta mendukung keberlanjutan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Banyuwangi. Melalui optimalisasi potensi sumber daya perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, serta pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan ikan bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, menjaga stabilitas pasokan komoditas perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi.

d. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan asal hewan, khususnya daging sapi, menjelang Ramadan 1447 Hijriah hingga Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor peternakan, mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap daging dan produk pangan asal hewan selama periode Ramadan dan Idulfitri. Sebagai bentuk antisipasi, Pemkab Banyuwangi menyiapkan sebanyak 19 ribu dosis vaksin PMK yang didistribusikan secara bertahap untuk ternak sapi maupun hewan rentan lainnya di berbagai wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan vaksinasi diarahkan terutama pada sentra-sentra peternakan rakyat sebagai upaya meningkatkan kekebalan ternak dan mengurangi risiko penyebaran PMK. Pencegahan penyakit pada ternak dinilai penting karena wabah PMK berpotensi menyebabkan penurunan produktivitas, gangguan perdagangan ternak,

hingga berkurangnya populasi ternak yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketersediaan pasokan daging di masyarakat. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memastikan kondisi kesehatan ternak tetap terjaga dan aktivitas produksi peternak dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain vaksinasi, Dispertan Banyuwangi juga meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak yang masuk maupun keluar daerah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko masuknya ternak yang terindikasi membawa penyakit dari wilayah lain sekaligus mencegah penyebaran PMK antarwilayah. Petugas kesehatan hewan turut diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan ternak, pemantauan kandang, serta memberikan pendampingan kepada peternak. Upaya ini diperkuat dengan edukasi mengenai penerapan kebersihan kandang, biosekuriti, serta pentingnya mengenali gejala PMK sejak dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan ternak yang menunjukkan indikasi penyakit.

e. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan energi, khususnya LPG bagi masyarakat, Kabupaten Banyuwangi mendorong penguatan infrastruktur distribusi melalui keberadaan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kecamatan Rogojampi. Kehadiran SPBE tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat rantai pasok dan pemerataan distribusi LPG hingga ke berbagai wilayah di Banyuwangi, termasuk daerah yang sebelumnya rentan mengalami keterlambatan pasokan. Sebelum SPBE Rogojampi beroperasi, distribusi LPG di Banyuwangi masih menghadapi berbagai kendala, seperti jarak distribusi yang cukup jauh dan keterbatasan pasokan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan LPG di sejumlah wilayah. Dengan beroperasinya SPBE selama kurang lebih dua tahun terakhir, sistem distribusi LPG menjadi lebih teratur dan memberikan kepastian pasokan bagi agen maupun pangkalan resmi. Kondisi ini turut mendukung stabilitas ketersediaan LPG di tingkat masyarakat, terutama pada periode meningkatnya permintaan seperti menjelang hari besar keagamaan. Dalam pengelolaannya, SPBE Rogojampi menerapkan sistem pemantauan stok dan distribusi secara berkala dengan melakukan evaluasi terhadap data pasokan dan penyaluran LPG. Selain itu, penyediaan buffer stock atau cadangan pasokan juga disiapkan sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi lonjakan permintaan. Distribusi LPG dilaksanakan berdasarkan data konsumsi dan alokasi yang terukur sehingga dapat meminimalkan risiko ketimpangan distribusi antarwilayah. Strategi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan LPG di Kabupaten Banyuwangi. Upaya menjaga ketersediaan pasokan LPG juga diwujudkan melalui penguatan jalur distribusi menuju wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap LPG dapat lebih merata dan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau wilayah tertentu. Pemerataan distribusi energi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan sistem pengawasan distribusi melalui pemanfaatan teknologi digital serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran LPG diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas distribusi energi di Banyuwangi. Dukungan terhadap keberadaan infrastruktur distribusi seperti SPBE Rogojampi menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menjaga ketersediaan pasokan LPG, mendukung ketahanan energi daerah, serta memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara aman, stabil, dan tepat sasaran.

f. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan dan memperkuat produksi

pertanian daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong pengembangan pertanian modern berbasis teknologi dan inovasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan budidaya hortikultura dengan sistem hidroponik berbasis drip irrigation yang diterapkan pada budidaya melon premium di kawasan Villa Green House, Dusun Tegalgondo, Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru. Pengembangan model pertanian tersebut menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah keterbatasan lahan dan tantangan budidaya konvensional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau langsung proses budidaya sekaligus panen melon premium yang dikembangkan dalam greenhouse berukuran sekitar 10 x 50 meter. Di dalam greenhouse tersebut terdapat sekitar 7.500 tanaman melon dari berbagai varietas premium, seperti Kirin atau Golden Kirin, Sweet Hami, dan Golden Aroma. Dengan penerapan teknologi budidaya yang lebih terkontrol, greenhouse tersebut mampu menghasilkan sekitar 1.000 buah melon setiap dua pekan. Produktivitas tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung kontinuitas pasokan komoditas hortikultura di daerah. Pemkab Banyuwangi juga mendorong Dinas Pertanian dan Pangan untuk terus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan petani agar model pertanian modern tersebut dapat dikembangkan secara lebih luas. Pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi budidaya, memilih komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan, serta mengoptimalkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang mengadopsi teknologi pertanian modern, kapasitas produksi hortikultura daerah diharapkan dapat meningkat dan menjadi sumber pasokan yang berkelanjutan. Budidaya melon tersebut juga menunjukkan adanya upaya optimalisasi pemanfaatan lahan berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi ekonomi. Sebelumnya, lahan tersebut digunakan untuk budidaya cabai, kemudian dialihkan menjadi budidaya melon karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dan memberikan hasil yang lebih menjanjikan. Setiap tanaman dipertahankan hanya menghasilkan satu buah melon agar kualitas dan ukuran buah dapat lebih optimal. Siklus budidaya selama sekitar 70–80 hari dengan bobot rata-rata 1,5–2 kilogram per buah memungkinkan produksi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Selain mendorong peningkatan produksi, pemerintah daerah juga mendukung pengembangan akses pasar hasil pertanian. Melon premium yang dihasilkan telah dipasarkan di wilayah Banyuwangi dan sebagian dikirim ke Jember. Perluasan pemasaran tersebut menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian Banyuwangi memiliki daya saing dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam maupun luar daerah. Dengan demikian, pengembangan sentra produksi tidak hanya meningkatkan kapasitas pasokan, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara produsen dan pasar.

g. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan dan energi menjelang Ramadan hingga Idulfitri 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap stok dan distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi peningkatan permintaan selama periode Ramadan dan Lebaran sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat mengganggu stabilitas pasar dan memicu kenaikan harga. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama adalah beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat. Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras di wilayah Banyuwangi mencapai

sekitar 97 ribu ton dan berada dalam kondisi surplus. Jumlah tersebut dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri. Kondisi stok yang memadai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus mengantisipasi peningkatan konsumsi selama periode hari besar keagamaan. Selain pangan, Pemkab Banyuwangi juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman. Pasokan BBM diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar 20 hari ke depan. Ketersediaan tersebut menjadi penting mengingat mobilitas masyarakat dan aktivitas distribusi barang cenderung meningkat menjelang dan selama Lebaran. Dengan stok BBM yang mencukupi, diharapkan aktivitas transportasi masyarakat maupun distribusi komoditas pangan dapat berjalan tanpa hambatan. Dalam menjaga kondisi tersebut, Pemkab Banyuwangi memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, Pertamina, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan pemantauan stok, harga, serta kelancaran distribusi pangan dan energi. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi sejak dini apabila terdapat potensi gangguan pasokan, baik di tingkat pasar maupun pada jaringan distribusi BBM. Langkah antisipatif ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kelangkaan maupun ketidakseimbangan pasokan akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

h. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Banyuwangi pada awal Ramadan 2026 untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok tetapstabil. Dari hasil pemantauan di lapangan, beberapa komoditas pangan diketahui mengalami kenaikan harga, terutama telur ayam dan daging ayam. Harga telur ayam tercatat naik menjadi sekitar Rp31 ribu per kilogram dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp27 ribu hingga Rp28 ribu per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada daging ayam yang ikut mengalami penyesuaian harga di tingkat pasar. Meski demikian, pemerintah daerah menilai bahwa daya beli masyarakat masih relatif terjaga sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan normal di pasar tradisional. Bupati Ipuk menjelaskan bahwa kenaikan sejumlah harga bahan pokok pada awal Ramadan merupakan pola yang umum terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah bersama TPID terus melakukan langkah antisipatif melalui pemantauan rutin, operasi pasar murah, serta penguatan distribusi bahan pangan agar tidak terjadi lonjakan harga yang berlebihan. Selain itu, upaya menjaga ketersediaan stok juga dilakukan melalui koordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga agar tidak membebani masyarakat, sekaligus memastikan distribusi barang tetap lancar selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

i. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan melalui modernisasi sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong penerapan smart farming dengan memanfaatkan teknologi, alat dan mesin pertanian (alsintan), sistem irigasi modern, serta teknologi digital dalam pengelolaan lahan. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi. Selain peningkatan produktivitas, Pemkab Banyuwangi juga mendorong regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian. Melalui pelatihan, pendampingan usaha tani, serta dukungan akses permodalan, petani milenial didorong untuk mengembangkan usaha pertanian yang inovatif, modern, dan

berorientasi ekonomi. Kolaborasi dengan kelompok tani serta pemanfaatan teknologi di lapangan juga terus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan produksi. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kesinambungan pasokan pangan daerah. Dengan meningkatnya produktivitas, efisiensi produksi, dan keterlibatan generasi muda, sektor pertanian diharapkan mampu menghasilkan pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung pengendalian inflasi daerah.

j. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, dan BPS melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Rogojampi serta salah satu penggilingan padi di Kecamatan Kabat menjelang Idul Fitri 2026 untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap aman. Dalam pemantauan di Pasar Rogojampi, sejumlah komoditas seperti beras, telur, daging sapi, bawang merah, dan cabai rawit dicek langsung oleh rombongan. Hasilnya, harga kebutuhan pokok secara umum masih relatif stabil meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas tertentu seperti daging sapi yang berada di kisaran Rp140 ribu per kilogram dan cabai rawit sekitar Rp97.000 per kilogram. Namun kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar karena meningkatnya permintaan menjelang hari raya. Selain itu, pedagang juga menyampaikan bahwa stok bahan pokok di pasar masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah dari pasar, rombongan melanjutkan sidak ke pabrik penggilingan padi yang menjadi salah satu pemasok utama beras di Banyuwangi. Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa produksi beras berjalan lancar dengan kapasitas ratusan ton per hari dan stok beras dalam kondisi sangat aman bahkan surplus. Bulog juga memastikan cadangan beras pemerintah di gudang berada pada level yang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idul Fitri. Pemerintah daerah bersama TPID menegaskan akan terus melakukan pemantauan harga dan distribusi bahan pokok agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak terkendali. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang tetap terjangkau menjelang hari raya.

k. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat ketersediaan pasokan pangan melalui pemanfaatan lahan dan pengembangan produksi komoditas pertanian. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi dalam pemanfaatan Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi. Lahan seluas sekitar 2,2 hektare yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dimanfaatkan untuk budidaya berbagai komoditas pangan, antara lain semangka, padi, jagung, sayuran, serta peternakan lele. Pada 15 Januari 2026, dilakukan panen semangka nonbiji dengan luas lahan sekitar 2.500 m2 dan menghasilkan sekitar 3.000 kg semangka. Selain itu, masih terdapat sekitar 1.000 m2 lahan yang akan dipanen dengan estimasi produksi mencapai 1.000 kg. Kegiatan tersebut melibatkan warga binaan dengan pendampingan petugas Lapas serta pembinaan dari Dinas Pertanian. Pemanfaatan lahan produktif tersebut tidak hanya meningkatkan produksi pangan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan. Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemkab Banyuwangi berupaya menjaga kesinambungan produksi dan memperkuat pasokan komoditas pangan dari sumber produksi lokal, sehingga dapat mendukung stabilitas

ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi daerah.

3. **Kelancaran Distribusi**
    a. Dalam rangka mengendalikan inflasi daerah melalui penguatan aspek kelancaran distribusi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong optimalisasi infrastruktur dan jaringan logistik untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran penyaluran komoditas strategis. Salah satu bentuk dukungan tersebut tercermin melalui aktivitas bongkar muat pupuk sebanyak 25.000 ton di Pelabuhan Tanjung Wangi pada awal tahun 2026. Pupuk yang diangkut menggunakan KM Noah Asyera dari Bontang, Kalimantan Timur, tersebut didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, termasuk dalam mendukung sektor pertanian di Banyuwangi. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Wangi sebagai simpul logistik strategis memiliki peran penting dalam memperlancar arus distribusi komoditas strategis yang berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan. Ketersediaan pupuk yang terdistribusi secara tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai menjadi faktor pendukung peningkatan produktivitas pertanian, sehingga mampu menjaga pasokan hasil pertanian dan meminimalkan risiko terjadinya gejolak harga di tingkat konsumen. Dengan demikian, kelancaran distribusi pupuk turut berkontribusi dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga terus mendorong sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengelola pelabuhan dan pelaku distribusi logistik, guna memastikan proses bongkar muat dan distribusi komoditas strategis dapat berjalan secara efisien, aman, dan berkelanjutan. Optimalisasi fasilitas pelabuhan dan peningkatan kualitas layanan logistik menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas distribusi antarwilayah serta mengurangi potensi hambatan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga. Melalui penguatan sistem distribusi dan dukungan terhadap infrastruktur logistik daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menjaga stabilitas pasokan komoditas strategis sebagai bagian dari implementasi strategi pengendalian inflasi pada aspek kelancaran distribusi (distribution smoothness). Upaya ini diharapkan mampu mendukung stabilitas harga, menjaga ketahanan sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
    b. Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis dan mendukung pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong penguatan infrastruktur distribusi energi melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang mendukung kelancaran distribusi tersebut adalah keberadaan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kecamatan Rogojampi yang berperan dalam memperkuat rantai pasok dan pemerataan distribusi LPG di Kabupaten Banyuwangi. Kehadiran SPBE Rogojampi menjadi solusi atas berbagai kendala distribusi LPG yang sebelumnya dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan pasokan dan potensi kelangkaan di sejumlah wilayah. Sejak beroperasi, distribusi LPG menjadi lebih teratur dan memberikan kepastian pasokan bagi agen maupun pangkalan resmi, terutama pada periode meningkatnya permintaan masyarakat seperti menjelang hari besar keagamaan. Dalam mendukung kelancaran distribusi, SPBE Rogojampi menerapkan sistem pemantauan stok dan distribusi secara berkala serta menyediakan buffer stock atau cadangan pasokan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Distribusi LPG dilakukan berdasarkan data konsumsi dan alokasi yang terukur sehingga mampu meminimalkan ketimpangan distribusi antarwilayah dan menjaga stabilitas pasokan secara merata. Melalui penguatan sistem distribusi LPG dan optimalisasi jalur distribusi hingga wilayah terpencil, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

berupaya menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Upaya ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan LPG bagi masyarakat, menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung terpenuhinya kebutuhan energi secara tepat waktu dan tepat sasaran.

c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya memperkuat kelancaran distribusi sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi daerah melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Plengsengan, Kelurahan Lateng. Pengembangan kawasan ini didukung dengan pembangunan berbagai fasilitas perikanan yang terintegrasi, seperti dermaga, pabrik es, area pendaratan ikan, fasilitas pengolahan hasil laut, serta rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperlancar rantai distribusi hasil perikanan, mulai dari aktivitas melaut, pendaratan hasil tangkapan, penyimpanan, hingga pengolahan dan pemasaran. Pembangunan SPBN juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran aktivitas nelayan melalui penyediaan bahan bakar yang lebih mudah diakses dan terjangkau, sehingga dapat membantu menekan biaya operasional dan biaya distribusi hasil perikanan. Selain itu, dukungan pemerintah pusat berupa bantuan kapal bagi nelayan serta pengembangan fasilitas hilirisasi hasil laut di KNMP diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kontinuitas pasokan komoditas perikanan. Hasil tangkapan nelayan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah dan dipasarkan melalui sektor kuliner maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dalam mendukung upaya tersebut, Pemkab Banyuwangi berperan dalam penyediaan lahan dan penguatan tata kelola kawasan KNMP, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait agar pembangunan dan operasional kawasan dapat berjalan optimal. Penguatan infrastruktur perikanan dan distribusi ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan ikan, mengurangi hambatan distribusi, menekan biaya logistik, serta menjaga kestabilan harga komoditas perikanan di tingkat masyarakat. Dengan demikian, pengembangan KNMP Banyuwangi menjadi salah satu upaya Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat kelancaran distribusi komoditas pangan, khususnya hasil perikanan, sehingga dapat mendukung stabilitas pasokan dan harga serta berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah.

d. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menjaga kelancaran distribusi melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, salah satunya dengan mendukung pengoperasian Jembatan Perintis Garuda di Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung. Jembatan yang menghubungkan Desa Seneporejo dengan Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, tersebut menjadi infrastruktur penting dalam memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi antarwilayah. Keberadaan jembatan mampu memangkas waktu tempuh masyarakat yang sebelumnya harus melalui jalur memutar atau menyeberangi sungai untuk menuju wilayah seberang. Dengan akses yang lebih dekat dan mudah, distribusi barang dan jasa dari dan menuju wilayah pedesaan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut juga mendukung petani, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengakses pusat-pusat perdagangan serta kegiatan ekonomi. Selain mendukung aktivitas ekonomi, peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur tersebut turut memperlancar akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan pelayanan lainnya. Pemerintah daerah bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait terus mendorong pembangunan infrastruktur yang

dapat mengurangi hambatan geografis dan memperkuat keterhubungan antarwilayah.

e. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat kelancaran distribusi dan mobilitas masyarakat melalui percepatan perbaikan infrastruktur jalan, terutama pada ruas jalan protokol dan jalur dengan tingkat lalu lintas tinggi menjelang Lebaran. Melalui Satgas Jalan Berlubang, Pemkab Banyuwangi melakukan penanganan pada berbagai titik jalan rusak dengan metode penambalan hotmix, termasuk sekitar 150 titik jalan yang diperbaiki dalam satu hari. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap layak dan aman dilalui, sehingga dapat mendukung kelancaran arus mudik, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan kebutuhan pokok. Perbaikan secara berkelanjutan juga diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan dan menjaga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Banyuwangi.
f. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menjaga kelancaran distribusi dan mobilitas masyarakat melalui penanganan cepat terhadap berbagai gangguan yang berpotensi menghambat akses jalan. Salah satunya dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Banyuwangi dengan mengevakuasi dahan pohon yang patah dan tersangkut pada jaringan telekomunikasi di Jalan Mawar, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri. Dahan tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas sekaligus menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan. Petugas kemudian melakukan pemotongan dahan, pengamanan area, serta pembersihan material yang menghalangi badan jalan dan jaringan utilitas. Langkah ini turut mendukung pengendalian inflasi daerah melalui terjaganya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, sehingga potensi hambatan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga dapat diminimalkan.

4. **Komunikasi Efektif**

a. Bupati Banyuwangi memanfaatkan datangnya Bulan Ramadan untuk menyapa masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komunikasi efektif dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah melalui penyelenggaraan Festival Ngerandu Buko Banyuwangi 2026. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Pantai Marina Boom pada bulan Ramadan tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi kuliner dan pariwisata, tetapi juga menjadi media komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi selama Ramadan. Festival Ngerandu Buko melibatkan sekitar 250 pelaku UMKM yang menyediakan berbagai makanan dan minuman untuk kebutuhan berbuka puasa. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan secara langsung dari pelaku usaha lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Informasi mengenai pelaksanaan pasar takjil juga menjadi sarana komunikasi publik untuk mengarahkan masyarakat dalam berbelanja dan memanfaatkan produk UMKM lokal. Selain itu, pemerintah daerah menyampaikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan higienitas pangan, termasuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, pelaku UMKM, dan masyarakat dilakukan untuk memastikan kegiatan pasar takjil berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Dengan demikian, Festival Ngerandu Buko tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan Ramadan dan pariwisata, tetapi juga menjadi instrumen komunikasi efektif dalam pengendalian inflasi melalui penyebarluasan informasi, edukasi masyarakat, fasilitasi aktivitas perdagangan, serta penguatan konsumsi produk lokal. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan

masyarakat, mendukung kelancaran transaksi selama Ramadan, dan menciptakan aktivitas ekonomi yang tetap stabil di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.

b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komunikasi efektif sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, TPID, serta berbagai stakeholder terkait. Bupati Banyuwangi menekankan pentingnya intervensi sejak dini dan konsistensi pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sebagai upaya memperkuat koordinasi, Bupati Banyuwangi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan tetap terjaga, khususnya menjelang Ramadan. Rakor tersebut melibatkan Wakil Bupati, Bank Indonesia Jember, Forkopimda, Bulog, BPS, KPPN, OPD, serta berbagai stakeholder teknis yang tergabung dalam pelaksanaan kebijakan TPID. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, menyampaikan kondisi terkini, serta memperkuat koordinasi dalam merespons potensi tekanan inflasi. Bupati juga mengarahkan OPD teknis untuk berkolaborasi dengan stakeholder dalam melaksanakan berbagai langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah, pengamanan stok pangan, dan pemantauan perkembangan harga serta pasokan komoditas strategis. Informasi mengenai kondisi pasokan dan harga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah intervensi secara cepat dan tepat.

c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komunikasi efektif dan pengawasan pangan melalui pemantauan keamanan makanan dan minuman di pasar takjil Ramadan. Pemerintah menginstruksikan perangkat daerah, Puskesmas, kecamatan, hingga pemerintah desa untuk secara rutin melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel makanan yang dijual pedagang guna memastikan produk terbebas dari bahan berbahaya dan aman dikonsumsi masyarakat. Dengan terdapatnya 60 titik pasar takjil yang melibatkan sekitar 2.245 pedagang, pengawasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas perdagangan pangan tetap aman dan kondusif selama Ramadan. Langkah tersebut turut mendukung pengendalian inflasi dengan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memastikan perdagangan pangan berjalan secara tertib selama periode meningkatnya permintaan Ramadan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2026
berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. **Keterjangkauan Harga**
   a. Pemkab Banyuwangi akan terus mendorong percepatan penyelesaian revitalisasi Pasar Banyuwangi melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak terkait. Optimalisasi pasar diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perdagangan, memperlancar distribusi, serta mendukung terbentuknya harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
   b. Pemkab Banyuwangi akan terus melaksanakan Operasi Pasar Murah secara bertahap di berbagai kecamatan, khususnya wilayah yang berpotensi mengalami

kenaikan harga. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

c. Pemkab Banyuwangi akan terus mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih melalui penyediaan aset dan penguatan sinergi dengan pemerintah desa/kelurahan serta stakeholder terkait. Koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
d. Pemkab Banyuwangi bersama TPID akan terus melakukan pemantauan harga komoditas pangan secara berkala sebagai langkah deteksi dini. Stabilnya harga sejumlah komoditas pada awal 2026 perlu terus dijaga melalui koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha.
e. Pemkab Banyuwangi akan terus memantau harga dan pasokan telur ayam ras menjelang Ramadan dan Idulfitri. Koordinasi dengan perangkat daerah, pelaku usaha, dan pihak terkait akan diperkuat untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
f. Pemkab Banyuwangi akan terus melanjutkan Program Warung Naik Kelas melalui pemberian bantuan modal, peralatan usaha, dan fasilitasi legalitas. Penguatan warung rakyat diharapkan dapat menjaga ketersediaan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dengan harga yang wajar.
g. Pemkab Banyuwangi akan terus memfasilitasi UMKM melalui penyelenggaraan pasar takjil Ramadan dan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan produk bagi masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya harga yang kompetitif.

2. **Ketersediaan Pasokan**
    a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil meningkatkan produksi padi tahun 2025 menjadi 806.407 ton dari 794.842 ton pada tahun sebelumnya. Dukungan optimalisasi lahan, perlindungan sawah, penyediaan pupuk bersubsidi, modernisasi pertanian, serta pendampingan petani menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pasokan pangan telah berjalan efektif. Ke depan, upaya tersebut perlu terus diperkuat untuk menjaga kesinambungan produksi dan stabilitas pasokan beras daerah.
    b. Program Bank Sperma Ternak dan inseminasi buatan telah mendukung peningkatan populasi ternak dengan capaian sekitar 2.300 kelahiran setiap bulan. Ketersediaan bibit unggul, distribusi sperma beku, serta dukungan 52 inseminator menunjukkan bahwa program berjalan secara berkelanjutan. Ke depan, perlu dilakukan penguatan layanan inseminasi dan pendampingan peternak untuk menjaga kontinuitas pasokan daging.
    c. Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya telah dilakukan melalui optimalisasi potensi perairan, penguatan kapasitas nelayan, dan pengembangan sektor perikanan. Meskipun produksi daerah masih berada di bawah kebutuhan konsumsi, potensi perikanan yang besar menjadi peluang untuk meningkatkan kemandirian pasokan ikan. Ke depan, diperlukan peningkatan produksi dan kapasitas nelayan secara berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
    d. Pencegahan PMK melalui penyediaan 19 ribu dosis vaksin, pengawasan lalu lintas ternak, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi kepada peternak menjadi langkah penting dalam menjaga populasi serta produktivitas ternak. Upaya tersebut telah memperkuat kesiapan daerah dalam menjaga pasokan daging menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ke depan, vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak perlu

dilakukan secara konsisten sebagai langkah antisipasi gangguan pasokan pangan hewani.

e. Keberadaan SPBE Rogojampi telah memperkuat sistem pasokan LPG di Banyuwangi dengan distribusi yang lebih teratur, penyediaan cadangan pasokan, serta pemantauan stok secara berkala. Kondisi tersebut membantu mengurangi risiko kelangkaan, terutama saat terjadi peningkatan permintaan. Ke depan, pengawasan distribusi dan pemerataan pasokan hingga wilayah terpencil perlu terus diperkuat untuk menjamin ketersediaan LPG bagi masyarakat.
f. Pengembangan budidaya melon berbasis greenhouse dan drip irrigation menunjukkan bahwa penerapan teknologi mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kontinuitas pasokan hortikultura. Produksi sekitar 1.000 buah melon setiap dua pekan serta pemasaran hingga luar daerah menunjukkan potensi pengembangan pertanian modern di Banyuwangi. Ke depan, pendampingan dan perluasan adopsi teknologi pertanian perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah.
g. Ketersediaan stok beras sekitar 97 ribu ton dan BBM yang diperkirakan mencukupi hingga 20 hari menunjukkan kondisi pasokan pangan dan energi dalam keadaan aman. Koordinasi Pemkab Banyuwangi bersama Bulog, Pertamina, dan TPID juga mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan. Ke depan, pemantauan stok dan distribusi perlu dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi peningkatan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri.
h. Hasil sidak menunjukkan bahwa stok bahan pokok di pasar masih mencukupi dan produksi beras pada penggilingan padi berjalan lancar dengan stok dalam kondisi surplus. Meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas seperti daging sapi dan cabai rawit, kondisi tersebut masih dinilai wajar dan tidak menunjukkan adanya gangguan pasokan. Ke depan, pemantauan harga dan stok perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang hari raya.
i. Penerapan smart farming, pemanfaatan alsintan, irigasi modern, serta pelibatan petani milenial menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan produksi pertanian. Program pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan turut mendukung regenerasi petani serta penguatan kapasitas produksi. Ke depan, penerapan teknologi dan keterlibatan generasi muda perlu diperluas agar ketersediaan pasokan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.
j. Sidak menunjukkan bahwa harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri 2026 secara umum masih terkendali, dengan stok beras dan komoditas pangan yang mencukupi. Kenaikan harga daging sapi dan cabai rawit masih dalam batas wajar seiring meningkatnya permintaan.
k. Pelaksanaan budidaya dan panen semangka di Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Banyuwangi menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan produktif melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Lapas Banyuwangi, dan Dinas Pertanian telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi komoditas pangan lokal. Produksi semangka nonbiji sebesar 3.000 kg dari lahan 2.500 m2, serta potensi tambahan sekitar 1.000 kg dari lahan yang belum dipanen, menunjukkan adanya potensi pengembangan produksi yang dapat mendukung ketersediaan pasokan pangan daerah. Selain itu, pelibatan warga binaan memberikan nilai tambah berupa peningkatan keterampilan dan produktivitas. Namun, agar kontribusi terhadap pasokan daerah lebih optimal, diperlukan penguatan kesinambungan produksi, pendampingan teknis, serta pengelolaan hasil panen dan pemasarannya secara lebih terencana.

3. **Kelancaran Distribusi**

Aktivitas bongkar muat 25.000 ton pupuk di Pelabuhan Tanjung Wangi

a. menunjukkan bahwa infrastruktur logistik daerah mampu mendukung kelancaran distribusi komoditas strategis. Ketersediaan pupuk yang didistribusikan secara tepat waktu turut mendukung produktivitas pertanian dan menjaga kesinambungan pasokan pangan. Ke depan, sinergi dengan pengelola pelabuhan dan pelaku logistik perlu terus diperkuat untuk memastikan distribusi pupuk dan komoditas strategis berjalan efektif dan tepat waktu.
b. Keberadaan SPBE Rogojampi telah meningkatkan keteraturan dan pemerataan distribusi LPG di Kabupaten Banyuwangi. Penerapan pemantauan stok, penyediaan buffer stock, serta distribusi berdasarkan data konsumsi membantu mengantisipasi lonjakan permintaan dan mengurangi risiko kelangkaan. Ke depan, pengawasan distribusi hingga wilayah terpencil perlu terus diperkuat agar pasokan LPG tetap merata dan tepat sasaran.
c. Pengembangan KNMP Plengsengan melalui pembangunan dermaga, pabrik es, area pendaratan ikan, fasilitas pengolahan, dan rencana SPBN menjadi langkah strategis dalam memperlancar rantai distribusi hasil perikanan. Integrasi fasilitas tersebut berpotensi mengurangi hambatan distribusi dan menekan biaya operasional nelayan. Ke depan, percepatan penyelesaian fasilitas dan penguatan koordinasi antarstakeholder perlu dilakukan agar KNMP dapat berfungsi optimal sebagai pusat distribusi dan hilirisasi hasil perikanan.
d. Pengoperasian Jembatan Perintis Garuda telah meningkatkan konektivitas antara Desa Seneporejo dan Desa Sambirejo serta memangkas waktu tempuh masyarakat. Infrastruktur tersebut turut mempermudah mobilitas barang dan jasa, khususnya bagi petani dan pelaku usaha dalam mengakses pusat perdagangan. Ke depan, pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan akses jalan pendukung perlu terus diperhatikan agar manfaat jembatan dalam memperlancar distribusi dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkelanjutan.
e. Perbaikan jalan melalui Satgas Jalan Berlubang menunjukkan respons cepat Pemkab Banyuwangi dalam menjaga kondisi infrastruktur, terutama menjelang peningkatan arus lalu lintas Lebaran. Penanganan sekitar 150 titik dalam satu hari menjadi langkah positif untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta mengurangi risiko kecelakaan.
f. Respons cepat TRC BPBD dalam menangani dahan pohon yang mengganggu jalan menunjukkan kesiapsiagaan Pemkab Banyuwangi dalam menjaga kelancaran akses dan mobilitas masyarakat. Penanganan tersebut turut mendukung kelancaran distribusi barang sehingga potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak pada kenaikan harga dapat diminimalkan.

4. **Komunikasi Efektif**
   a. Pelaksanaan Festival Ngerandu Buko telah menjadi sarana komunikasi efektif antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pelaku UMKM, dan masyarakat selama Ramadan. Kegiatan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi mengenai aktivitas pasar takjil dan produk lokal, tetapi juga memberikan edukasi mengenai kebersihan, keamanan pangan, dan pengelolaan sampah. Ke depan, komunikasi publik melalui kegiatan serupa perlu terus diperkuat untuk menyampaikan informasi harga, ketersediaan pangan, serta mendorong masyarakat berbelanja produk lokal.
   b. Pelaksanaan Rakor/HLM TPID telah memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, OPD, BI Jember, Bulog, BPS, Forkopimda, dan stakeholder terkait dalam merespons potensi tekanan inflasi. Penyampaian informasi mengenai perkembangan harga, stok, dan kondisi pasar menjadi dasar

bagi pemerintah dalam menentukan langkah intervensi secara cepat. Ke depan, koordinasi lintas sektor dan penyampaian informasi secara berkala perlu terus ditingkatkan agar potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.

c. Pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman di pasar takjil menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara Pemkab, Puskesmas, kecamatan, dan pemerintah desa dalam memastikan keamanan pangan selama Ramadan. Kegiatan ini membantu menciptakan perdagangan pangan yang aman dan kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. **Keterjangkauan Harga**
   a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memperkuat koordinasi dan monitoring penyelesaian revitalisasi Pasar Banyuwangi, termasuk kesiapan relokasi pedagang, penataan kios dan los, serta memastikan pasar dapat segera beroperasi secara optimal. Setelah beroperasi, perlu dilakukan pemantauan harga dan aktivitas perdagangan secara berkala agar fungsi pasar sebagai pusat distribusi dapat mendukung keterjangkauan harga.
   b. Pelaksanaan operasi pasar murah perlu terus diperluas dan diarahkan pada wilayah yang mengalami tekanan harga atau peningkatan permintaan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas distribusi komoditas dan ketepatan sasaran agar manfaat selisih harga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
   c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mempercepat penguatan kelembagaan dan operasional Koperasi Merah Putih agar dapat berfungsi sebagai titik distribusi kebutuhan pokok di tingkat desa/kelurahan. Koperasi juga perlu didorong untuk bermitra dengan produsen, distributor, dan UMKM lokal sehingga rantai distribusi lebih pendek dan harga lebih terjangkau.
   d. Pemantauan harga komoditas strategis perlu dilakukan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga. Hasil pemantauan perlu menjadi dasar penentuan intervensi, seperti operasi pasar, penguatan pasokan, atau kerja sama antardaerah apabila terjadi tekanan harga.
   e. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan pemantauan harga dan pasokan telur ayam ras, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Koordinasi dengan peternak, distributor, dan pedagang perlu diperkuat untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.
   f. Program Warung Naik Kelas perlu dilanjutkan dengan memastikan bantuan modal dan peralatan dapat meningkatkan kapasitas stok serta keberlangsungan usaha. Sementara itu, pasar takjil perlu terus ditata dan diperluas secara proporsional agar masyarakat memiliki akses terhadap berbagai pilihan pangan dengan harga yang kompetitif sekaligus meningkatkan pemasaran produk UMKM lokal.
2. **Ketersediaan Pasokan**
   a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mempertahankan peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan, pengamanan lahan sawah, penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan modernisasi pertanian dan pendampingan petani.
   b. Program IB perlu terus dioptimalkan dengan menjamin ketersediaan bibit unggul, sperma beku, serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan inseminator

untuk menjaga pertumbuhan populasi dan pasokan daging.

c. Pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan sarana produksi, kapasitas nelayan, serta pengembangan wilayah penangkapan untuk mengurangi ketergantungan pasokan ikan dari luar daerah.
d. Vaksinasi PMK dan pengawasan lalu lintas ternak perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama pada sentra peternakan, disertai penguatan biosekuriti dan edukasi kepada peternak untuk menjaga populasi serta pasokan daging.
e. Pemantauan stok dan distribusi LPG perlu terus diperkuat dengan memastikan ketersediaan buffer stock serta pemerataan penyaluran hingga wilayah terpencil untuk mencegah kelangkaan, terutama saat permintaan meningkat.
f. Pengembangan pertanian berbasis teknologi perlu diperluas melalui pendampingan petani, penguatan akses pasar, serta pengembangan sentra produksi agar kontinuitas dan kapasitas pasokan hortikultura daerah semakin meningkat.
g. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mempertahankan pemantauan stok dan distribusi beras serta BBM secara berkala, dengan memperkuat koordinasi bersama Bulog, Pertamina, dan TPID untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
h. Sidak pasar dan sentra produksi perlu dilakukan secara berkala sebagai langkah deteksi dini terhadap perubahan harga dan ketersediaan stok, serta segera ditindaklanjuti dengan intervensi apabila ditemukan potensi kelangkaan atau kenaikan harga.
i. Penerapan smart farming perlu diperluas melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi petani, khususnya generasi muda, guna meningkatkan produktivitas dan menjamin keberlanjutan pasokan pangan daerah.
j. Pemkab bersama TPID perlu meningkatkan pemantauan harga, stok, dan distribusi, khususnya pada komoditas yang mengalami kenaikan harga. Koordinasi dengan Bulog, penggilingan, distributor, dan pedagang perlu diperkuat serta disiapkan intervensi pasar apabila terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali.
k. Perlu mempertahankan dan memperluas sinergi dengan Lapas Banyuwangi melalui pendampingan berkelanjutan dari Dinas Pertanian, khususnya dalam pemilihan komoditas yang memiliki potensi produksi dan nilai ekonomi tinggi serta sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemanfaatan lahan SAE dapat dikembangkan melalui pola tanam yang berkelanjutan dan diversifikasi komoditas sehingga produksi tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman.

3. **Kelancaran Distribusi**
   a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu terus memperkuat koordinasi dengan pengelola pelabuhan dan distributor untuk memastikan bongkar muat serta penyaluran pupuk berjalan tepat waktu dan merata, terutama menjelang musim tanam.
   b. Pemantauan stok dan distribusi LPG perlu dilakukan secara berkala dengan menjaga ketersediaan buffer stock serta memperkuat pemerataan penyaluran hingga wilayah terpencil untuk mencegah keterlambatan dan kelangkaan pasokan.
   c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mempercepat penyelesaian dan optimalisasi fasilitas KNMP, termasuk dermaga, pabrik es, SPBN, dan fasilitas pengolahan, agar rantai distribusi hasil perikanan semakin efisien dan biaya logistik dapat ditekan.
   d. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memastikan pemeliharaan dan keberlanjutan fungsi Jembatan Perintis Garuda agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga, sehingga mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa

dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

e. Pemkab Banyuwangi perlu melanjutkan pemantauan dan perbaikan jalan secara berkala, terutama pada ruas dengan tingkat lalu lintas tinggi dan lokasi yang rawan mengalami kerusakan akibat curah hujan. Selain penambalan, diperlukan pemeliharaan dan penanganan drainase secara berkelanjutan agar kerusakan jalan tidak cepat kembali dan kelancaran distribusi tetap terjaga.
f. Pemkab Banyuwangi perlu memperkuat pemantauan terhadap kondisi jalan dan titik rawan gangguan, terutama saat cuaca ekstrem, serta memastikan respons cepat dapat dilakukan ketika terjadi hambatan. Koordinasi antarinstansi dan kanal pelaporan masyarakat juga perlu terus dioptimalkan untuk menjaga kelancaran distribusi dan mencegah gangguan pasokan.

4. **Komunikasi Efektif**
   a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat terus mempertahankan dan mengembangkan Festival Ngerandu Buko sebagai sarana komunikasi publik dan penguatan ekonomi lokal. Ke depan, kegiatan dapat disertai penyampaian informasi harga pangan, edukasi konsumsi pangan yang bijak, serta pembinaan UMKM agar mampu menyediakan produk yang berkualitas dan terjangkau selama Ramadan.
   b. Koordinasi TPID melalui Rakor HLM dapat terus dilaksanakan secara berkala dan diperkuat dengan sistem pemantauan harga, stok, dan distribusi komoditas strategis secara terpadu. Setiap hasil rapat perlu ditindaklanjuti dengan pembagian tugas dan langkah intervensi yang jelas agar potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.
   c. Pemkab Banyuwangi perlu mempertahankan pemeriksaan keamanan pangan secara rutin di seluruh titik pasar takjil dan meningkatkan edukasi kepada pedagang mengenai penggunaan bahan pangan yang aman. Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar pengawasan dapat dilakukan secara konsisten, terutama pada periode peningkatan aktivitas dan permintaan pangan.